

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang kemampuan bertahan dan beradaptasi aliansi bisnis politik dominan di Bangkalan pasca berakhirnya kekuasaan politik Fuad Amin Imron (Fuad Amin) dalam mempengaruhi proses politik dan kekuasaan dalam proses demokrasi lokal di Bangkalan serta implikasinya terhadap hubungan negara dengan *civil society*<sup>1</sup>. Awal terbentuknya aliansi politik Fuad Amin bisa ditelusuri dari beberapa hal. *Pertama*, reformasi yang hadir untuk mencongkel kekuasaan otoritarianisme Orde Baru dari kursi kekuasaan tidak serta diimbangi dengan tatanan hukum yang telah siap dari segi sosiologi hukum dan yuridisnya. *Kedua*, *civil society* masih lemah dan berpenjar menjauhi kekuasaan politik dominan. *Ketiga*, Fuad Amin sebagai salah satu cicit Ulama besar NU kharismatik di Bangkalan, Syaikhona Moh. Kholil, dan: keempat posisi Fuad Amin sebagai *blater*, salah satu kelompok orang kuat lokal di Bangkalan (Yanwar, 2018:191-194).

---

<sup>1</sup> Civil Society atau masyarakat sipil sering dilihat sebagai media bagi transformasi politik. Ini karena masyarakat sipil bukan hanya sebagai ikatan sosial di luar organisasi resmi yang mampu menggalang solidaritas kemanusiaan bagi terciptanya kebaikan bersama di bawah prinsip egalitarianisme dan inklusivisme universal, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah serta menghalangi tindak-tanduk mereka yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Lihat Cohen, J L., & Arato, 1992. *Civil society and political theory*. Chambridge: Massachussetts Institute of Technology Press dan Gallner, E. 1994. *Condition of Liberty: civil-society and its rivals*. London: Hamish-Hamilton. Hlm. 5

Reformasi politik pasca runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998 tidak otomatis mendorong lahirnya demokratisasi kemudian menciptakan situasi terbukanya kesempatan masyarakat sipil agar terlibat dalam proses pergantian dan perubahan kekuasaan. Perubahan kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi justru melahirkan banyak “Soeharto kecil” di Indonesia, khususnya di arena politik dan demokrasi lokal (Robison, 2012:76) yang mengampusti kesempatan masyarakat sipil untuk ikut berkompetisi dan berpartisipasi dalam aras demokrasi dan kekuasaan politik. Kondisi politik era reformasi ini nampaknya memiliki kemiripan dengan kajian Olson dan McGuire (1996) mengenai bergesernya kekuasaan ekonomi politik dari *stationary bandits* (bandit besar) menuju *roving bandits* (bandit kecil). Migdal (1988) menyebut fenomena seperti ini dengan *local strongmen* (orang kuat lokal), atau dalam istilah Sidel (1999) disebut *local bossism* (bos lokal) dan Vedi Hadiz (2004) menyebutnya sebagai aliansi predatoris.

Orang kuat lokal, bos lokal dan predatoris (elit lokal) muncul di Indonesia pasca reformasi seiring dengan berubahnya sistem sentralistik ke desentralistik di mana kewenangan yang sebelumnya terkonsentrasi di pemerintahan pusat beralih ke pemerintahan daerah. Gelombang desentralisasi sebagai kekuatan politik baru melawan pemeritahan otoriter telah dimulai di Amerika latin pada tahun 1970-an (Bland, 2011:66). Diterapkannya desentralisasi di Indonesia telah melahirkan berbagai kekuatan predator lokal (Hadiz 2010) yang berusaha membajaknya dengan politik uang (Aspinal 2014), kekerasan dan pemaksaan melalui

premanisme politik. Mereka adalah aktor yang terinkubasi oleh rezim represif Orde Baru. Ketika keterbukaan politik melalui cara-cara demokratis telah tersedia, kelompok ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan aturan main yang berlaku.

Desentralisasi yang hadir untuk meruntuhkan tatanan oligarki dan hegemoni kekuasaan ekstraktif Orde Baru kemudian menjadi entitas baru yang ditunggangi oleh elit politik lokal Indonesia untuk membangun tatanan oligarki politik dan ekonomi baru, sehingga memunculkan orang-orang kuat di arena politik lokal melalui penguasaan *state tangible resource*. Cita-cita reformasi untuk menggagas pembangunan pemerintahan daerah dengan tata kelola dan kelembagaan yang akuntabel, responsif, dan melibatkan partisipasi masyarakat (Hadiz, 2005: 290-292) justru ditunggangi oleh tampilnya *existing sosial power* dengan mengakomodasi aliansi bisnis politik seperti birokrat, politisi, dan elit di tingkat lokal. Singkatnya, runtuhnya rezim oligarki Orde Baru tidak serta merta diikuti oleh tumbanganya aktor-aktor oligarki yang lahir dan dibesarkan di rezim Orde Baru. Kelompok ini memiliki kemampuan beradaptasi dalam pelembagaan baru.

Argumen di atas menunjukkan bahwa desentralisasi menggiring arus kekuasaan tidak hanya pada ranah nasional-internasional namun terlokalisir menuju arena kontestasi politik kekuasaan lokal<sup>2</sup>. Adanya

---

<sup>2</sup> Pada tahun 1970-an Transisi demokrasi sentralisasi ke desentralisasi juga terjadi di Amerika latin yang mengupayakan distribusi demokrasi hingga ke pemerintahan lokal. Hal ini dilakukan untuk memperebutkan otoritas di tatanan demokrasi lokal. Lihat Bland, Gary. 2011. *Considering Local Democratic Transition in Latin America*. Journal of Politics in Latin America, Vol. 3, No. 1, h. 65-98.

kekuasaan politik di tingkat lokal memberikan kewenangan bagi rezim/pemerintah lokal untuk terlibat dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Situasi ini memberikan ruang terbuka bagi mereka untuk mengontrol kekuasaan dan penguasaan sumberdaya melalui praktik politik klientilistik (Aspinall 2014:1-11), praktik *rent-seeking* (Girling, 1997:21), kekerasan dan praktik korupsi. Kekuatan elit lokal juga tidak jarang menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk berebut *resources* negara dalam pertarungan elektoral<sup>3</sup>. Posisi ini diincar karena dampak kekuasaan yang sangat menguntungkan bagi aliansi bisnis dan politik dikemudian hari, khususnya terhadap pengendalian dan pengaturan langsung sumberdaya-sumberdaya atau kekayaan daerah serta hak-hak istimewa lainnya di aras lokal. Untuk mewujudkannya, selain mengkomodasi birokrat dan politisi di tingkat lokal, mereka juga kerap kali menggunakan isu-isu agama dan politik identitas untuk memobilisasi kelompok masyarakat demi kepentingan kelompok predatori mereka.

Keberadaan bos lokal merupakan pembabakan baru dari persaingan kekuatan ekonomi politik Orde Baru pasca berakhirnya kekuasaan Soeharto. Kemunculan mereka dapat dibagi dalam dua kelompok yang berbeda. *Pertama*, sebagai kelompok yang mendukung proses politik yang dijalankan oleh Orde Baru. *Kedua*, kelompok oposisi yang berlawanan dengan kebijakan ekstraktif Orde Baru. Pasca runtuhnya Orde Baru dan reformasi diaplikasikan dalam bentuk pemilihan kepala

---

<sup>3</sup> Seringkali dalam pertarungan elektoral para elit menggunakan berbagai upaya termasuk penggunaan klientilisme politik melalui politik uang. Politik uang merujuk pada praktik pembelian suara.

daerah secara langsung dan otonomi daerah. Kedua kelompok ini meneguhkan ambisi politik serta berkompetisi untuk menguasai daerah yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat lagi. Kembalinya kaum oposisi yang selama rezim Orde Baru dibungkam dan ditindas ke gelanggang politik lokal memberikan dimensi ketegangan baru dengan kelompok yang dulu berada di balik ketiak Orde Baru di ranah politik lokal. Bahkan kelompok-kelompok tersebut menggunakan berbagai cara untuk menjadi raja lokal di daerah (Agus dan Leo, 2012:86). Seluruh sumberdaya kekuasaan dipraktikkan, termasuk suap dan kekerasan. Kondisi ini memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi kemunculan elit di aras demokrasi lokal.

Bila ditelisik lebih jauh, fenomena elit lokal (bos lokal) telah lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan terjadinya demokratisasi dan perubahan struktur politik di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia (Sidel, 2005:78-79). Di Filipina, negara yang dikenal dengan gerakan *people power*, dewasa ini diwarnai oleh menjamurnya elit informal yang gandrung menjadi elit formal politik (Sidel,2005:65). Para elit ini tidak hanya bermain di arena politik nasional, tetapi juga menyusup ke kancah lokal<sup>4</sup>. Hal ini juga terjadi di Thailand. Dalam kajian McVey, bos lokal menjadi-realitas dalam kehidupan politik Thailand. Para bos lokal Thailand disebut dengan istilah *cha- pho* (baca; jao-poh) yang

---

<sup>4</sup> Di Filipina, bos lokal atau elit ekonomi berangkat dari perpaduan antara bertahannya dinasti keluarga “tuan tanah lama” (oligarki) dengan jaringan-jaringan dan hubungan patron-klien di antara mereka. Beberapa keluarga oligarki lama yang menjadi pemain politik di Filipina di antaranya: keluarga lacson dan Montelibanos dari Provinsi Negros, Osmeoas dan Duranos dari Cebu, dan Joson dan Diazs dari Nueva Ecija.

memiliki arti bapak pelindung. Para bapak pelindung ini dapat dikenali dari sifat monopolistik mereka dalam hampir segala kegiatan ekonomi mulai dari transportasi, pertanian, pertambangan, penggilingan, percetakan, waralaba, pabrik pengolahan, saham bank, dan lainnya (Leo dan Agus, 2010:11) berada di bawah kendali jejaring kekuasaannya. Sebelum tahun 1973, *chao-pho* dikenal karena kemampuannya mengontrol jajaran elit politik di aras lokal. Mereka juga disegani karena kemampuannya mengendalikan masyarakat melalui aparatur koersifnya di daerah. Pola bos lokal di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Thailand dan Filipina, di Indonesia bos lokal lebih merujuk pada mafia, jaringan, marga serta perubahan struktur dan dinamika politik yang ditandai dengan hadirnya reformasi dan desentralisasi ditandai dengan pemilihan umum di tingkat lokal (Sidel, 2005).

Pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto, telah bermunculan tokoh-tokoh lokal yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk berkuasa pada akhirnya menjadi penguasa lokal (bos lokal) dan memegang kontrol secara penuh pada saluran kekuasaan/pemerintahan, ekonomi, dan politik. Salah satu di antara mereka adalah Fuad Amin Imron (Fuad Amin) elit lokal dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Munculnya Fuad Amin sebagai bos lokal tidak berasal dari modal eksistensi sebagai "*kaki tangan*" Orde Baru melalui keuntungan dari kapitalisme pasar. Tetapi hal itu dapat ditarik dari latar belakang sosial budayanya sebagai keturunan KH. Moch Kholil, anak dari politisi nasional R.KH. Amin Imron, serta afiliasinya dengan kelompok kekerasan

Bangkalan, *blater*. Fuad Amin juga bukan merupakan individu yang menikmati inkubasi politik Orde Baru, ayahnya sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru memilih berlawanan dengan pihak penguasa ketimbang melakukan kerjasama. Dia justru lebih dikenal sebagai kiai yang berprofesi sebagai pengusaha yang bergerak dalam pelayanan haji dan penyalur tenaga kerja Indonesia.

Fuad Amin memulai perebutan kekuasaan di tingkat lokal dengan menggunakan momentum politik menjelang berakhirnya masa jabatan Moch Fatah sebagai bupati Bangkalan periode 1998-2003. Fuad Amin yang waktu itu terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 1999-2003 dari PKB, sudah mulai mengincar dan mengondisikan berbagai elemen politik di Bangkalan untuk menggantikan Moch Fatah. Upaya itu dilakukan Fuad Amin dengan terus memengaruhi anggota DPRD dari fraksi PKB yang memiliki kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penolakan Laporan Pertanggungjawaban tahunan bupati (Rozaki, 2016:111)

Di dalam pemilihan kepala daerah yang masih dilakukan oleh DPRD, Fuad Amin menyadari bahwa PKB menjadi kekuatan kunci untuk mengantarkan dirinya menuju kursi pencalonan sekaligus keberhasilan sebagai bupati. Fuad Amin lantas terus melakukan tekanan dan lobi politik kepada anggota dewan fraksi PKB sampai akhirnya PKB kabupaten Bangkalan secara resmi mendukung pencalonan Fuad Amin sebagai calon bupati Bangkalan periode 2003-2007 (Rozaki, 2016:112)

Pada tanggal 6 Januari 2003, Fuad Amin yang berpasangan dengan Madong dicalonkan oleh PKB dan PDIP melawan pasangan Sulaiman dan Sunarto yang dicalonkan oleh PPP dan Golkar. Hasil pemilihan Bupati yang dilakukan oleh DPRD Bangkalan itu akhirnya memenangkan pasangan Fuad Amin dan Madong dengan perolehan 42 suara (93,33 %) mengalahkan rivalnya pasangan Sulaiman dan Sunarto yang memperoleh tiga suara (6,67%). Perolehan 42 suara anggota DPRD ini diperoleh dari fraksi PKB, PDIP dan Fraksi TNI/Polri sebanyak lima suara (Rozaki, 2016:113).

Terpilihnya Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan menjadi babak baru politik lokal di Madura khususnya di Bangkalan. Fuad Amin yang berasal dari kultur keagamaan dominan, Nahdlatul Ulama' (NU), dan trah Syaikhona Kholil (Bani Kholil) yang selama ini lebih banyak mengambil jalur politik kultural<sup>5</sup> dan berada di pinggiran kekuasaan kini menjadi sentral politik baru pemerintahan di tingkat lokal. Max Webber telah memprediksi hal ini jauh-jauh hari. Ia menyebutkan bahwa sumber kekuasaan terbagi dalam tiga tipe legitimasi. Yakni, tradisional, kharisma, dan instrumen rasional. Terpilihnya Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan telah menunjukkan bahwa tiga sumber ini menyatu dalam konstruksi diri Fuad Amin. Dia memperoleh identitas tradisionalnya

---

<sup>5</sup> Sebelumnya, ada sosok KH. Kholil AG, sepupu Fuad Amin yang menggunakan trah Bani Kholil sebagai lambang perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. KH. Kholil AG membentuk Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan jembatan Suramadu karena dianggap tidak memiliki orientasi membangun Madura, tetapi membangun di Madura.



sebagai trah Bani Kholil dan sebutannya sebagai Kiai<sup>6</sup> dan haji yang selalu disandangnya. Kharisma diproduksi olehnya dari lingkungan keagamaan dan non keagamaan, yakni dunia *blater*<sup>7</sup>. selama remaja dan periode awal dewasanya Fuad Amin dibesarkan dalam tradisi *keblateran* Madura. Kemudian, sebagai bupati terpilih, Fuad Amin mendapat legalitas rasional untuk menggunakan dan mengendalikan berbagai instrumen pemerintahan dalam memperkokoh legitimasi kekuasaannya (Rozaki, 2016:115-116)

Sosok Fuad Amin kemudian membentuk dirinya menjadi penguasa tunggal di aras politik lokal di Bangkalan. Dia menggunakan berbagai instrumen sosio-kultural yang melekat padanya untuk mempertahankan kekuasaan yang diperoleh. *Pertama*, Fuad Amin membangun representasi tunggal sebagai sosok yang paling otoritatif terhadap klaim trah Bani Kholil dibandingkan dengan sesama Bani Kholil lainnya. Dia menggunakan dua pendekatan untuk menghadirkan ikon ini ke dalam proses pembentukan dirinya, yakni dengan mereproduksi silsilah (genealogy) yang merujuk garis tunggal sebagai keturunan laki-laki satu-satunya dari trah Bani Kholil. Berikutnya Fuad Amin mengkonsolidasi Bani Kholil dan menjadikan dirinya sebagai ketua yayasan Bani Kholil.

---

<sup>6</sup> Secara terminologi, kiai merupakan orang yang ahli agama, tinggal di tengah para santri, jauh dari kepentingan dan perdebatan politik, menjadi teladan dalam hal kesederhanaan dan kesalehan hidup, dan menjadi tempat orang berkonsultasi untuk mencari ketenangan hidup. Lihat \_\_\_\_\_, 2010. *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: Kompas. Hlm. 3

<sup>7</sup> Blater orang yang memiliki kepandaian dalam hal kanuragan, terkadang disertai pula dengan ilmu kekebalan dan kemampuan magis yang menambah daya kharismatis lainnya. Mereka juga memiliki kemampuan dalam ilmu agama, tetapi sebatas untuk pengembangan dirinya semata. Yang menonjol justru peran sosialnya sebagai sosok orang kuat di desa. Lihat, Rozaki. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura*. Hlm 9-17

Dengan dua pendekatan ini, dia berhasil menjadi sentral dan menjadikan anggota Bani Kholil lainnya berada di pinggiran pangaruh darinya. Fuad Amin menyadari betul jika orang Madura sangat menghormati Syaikhona Kholil (Rozaki, 2016:124)

*Kedua*, menundukkan dan merangkul para *klebhun*<sup>8</sup> atau kepala desa melalui praktik klientilisme politik agar selalu menjadi tergantung padanya<sup>9</sup>. Esensi klientilistik adalah *quid pro quo*, sesuatu untuk sesuatu (Aspinall, 2019:2), atau, bagaimana sering digambarkan dalam pustaka keilmuan, pertukaran yang kontingen (misalnya Stokes, 2013:7; atau Hicken, 2011:291). Fuad Amin sangat memahami kelemahan dan kelebihan para *klebhun* di Bangkalan<sup>10</sup>. Melalui *klebhun* inilah Fuad Amin membajak kepentingan rakyatnya untuk kepentingan klientilistiknya (Calvo dan Murillo, 2014:17; Nichter, 2014:78). Bahkan dana pembangunan bukan hanya menjadi sumber pekerjaan melainkan juga korupsi (Samuel, 2002:845-863). Kontrak dan proyek-proyek pemerintah menjadi sumber kehidupan bagi tumbuh suburnya politik lokal di Bangkalan (Aspinall, 2013:27-54)

---

<sup>8</sup> Klebhun atau kepala desa umumnya merupakan orang yang disegani di desa. Tak jarang mereka juga pimpinan blater yang menentukan aman atau tidaknya sebuah desa.

<sup>9</sup> Pendekatan politik seperti ini memiliki kemiripan dengan pendekatan politik yang dilakukan oleh Soeharto saat berkuasa, yakni dengan menggunakan politik *glembuk*. *Glembuk* dilakukan dengan merangkul pihak-pihak untuk mendukung kekuasaannya dan melakukan *ghepuk* (memukul) pada orang yang mengganggu atau tidak mau diatur dan tidak mau menyesuaikan dengan kepentingannya.

<sup>10</sup> Salah satu kelemahan mereka adalah bahwa posisi para *klebhun* masih sangat lemah secara hukum. Sebab banyak di antara mereka yang masih berstatus sebagai Pejabat Sementara (PJs). Jabatan *klebhun* merupakan *prestise* di kalangan masyarakat Madura sebagai legitimasi orang kuat lokal dan dapat mengangkat martabat keluarga dan ikatan kekerabatan lainnya.

*Ketiga*, Fuad Amin membangun politik dinasti dalam kerangka politik patrimonial. Politik dinasti dilakukan dengan mendorong putra mahkotanya Makmun Ibnu Fuad Amin (Mumun) untuk bertarung dalam pilkada 2012. Fuad Amin menyadari bahwa kekuasaan politik yang selama ini ia rebut dan bangun selama periode kepemimpinannya menjadi bupati Bangkalan harus tetap dalam komandonya. Artinya, Fuad Amin masih mengendalikan roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan (Nurcholis, 2016:2018). Fenomena dinasti politik model familisme juga terjadi di Filipina, di mana terdapat 105 dinasti politik baik yang berkembang di ranah politik lokal maupun nasional (Garzon, 2002:1-4). Hal yang paling menarik adalah pengaruh kekerabatan yang berkembang di Filipina dan di Bangkalan di bawah kekuasaan Fuad Amin memiliki kesamaan yakni pengaruh kekerabatan tidak hanya berlangsung pada level legislatif maupun eksekutif, tetapi juga merambah ke arena yudikatif maupun aparat penegakan hukum lainnya (Djati, 2013:209).

Pendekatan kekuasaan yang digunakan oleh Fuad Amin di Kabupaten Bangkalan merupakan praktik politik predator di mana tumbuhnya dinasti politik terjadi karena adanya kolusi bisnis politik di tingkat lokal (Asako, 2010:48). Apa yang terjadi di Bangkalan di bawah kekuasaan politik Fuad Amin kemudian menunjukkan bahwa jejaring keluarga dan patronase telah menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang pada akhirnya dibagikan kepada kroni-kroninya (Djati, 2013:206). Dinasti politik Fuad Amin dan jejaring politik familismenya mengharuskan warganya mengakui sentralitas dari keluarga Bani Kholil

untuk kehidupan sosial dan proses politik (Joseph, 2011:152). Kemudian berperan sebagai patron dalam menjaga stabilitas kolusi tersebut dengan menempatkan sanak familinya ke dalam jajaran perusahaan atau pemerintah.

Praktik politik kekuasaan Fuad Amin merupakan bentuk kartel aliansi bisnis politik dan menjelaskan tentang adanya pengaruh seorang elit yang secara individual (*local bossism*) membangun hubungan patrimonialistik dalam masyarakat maupun negara. Kemampuan Fuad Amin dalam menggunakan status sosial keagamaan sebagai keturunan Bani Kholil, *blater*, serta bagaimana keahliannya dalam menyandera para *klebhun* merupakan bentuk kolektif dari patronase yang memunculkan monarki dalam demokrasi di aras lokal. Beberapa orang yang menjadi aliansi bisnis Fuad Amin misalnya CA , politisi nasional yang menjadi kroni bisnisnya di Bangkalan. CA menjadi *client* Fuad Amin karena kemampuannya mengatur hasil kontestasi elektoral di Bangkalan dan Madura. Menurut AB komisioner KPU Bangkalan 2014-2019, Fuad Amin berupaya mengatur perolehan suara CA dan beberapa kroninya di Bangkalan dengan menekan kelompok penyelenggara pemilu. Kemudian ada Ali Wahdin, sosok kiai dan mantan Ketua DPRD Bangkalan periode 2008-2013 yang menjadi aliansi politiknya. Dia bersama sepupu Fuad Amin Syafii Rofii (mantan wakil Bupati Bangkalan 2008-2013) mengakomodir kepentingan para kiai di Bangkalan yang menjadi basis kekuatan kelompok elit melalui klientilisme politik.

Fuad Amin mampu melakukan kontrol terhadap kekuasaan politiknya sekalipun dia berada di penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus suap suplai gas dan pembayaran kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014. Di balik jeruji penjara Fuad Amin mampu mengantar adiknya Latief Amin Imron sebagai Bupati Bangkalan. Saat ini *landscap* politik kekuasaan politik kabupaten Bangkalan tengah mengalami transisi pasca Fuad Amin dinyatakan meninggal dunia pada 16 September 2019 lalu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian ini, yakni: Bagaimana aliansi bisnis politik dominan bertahan dan beradaptasi pasca berakhirnya kekuasaan politik bos lokal Fuad Amin di Kabupaten Bangkalan?

## **1.3 Tujuan**

Studi ini dilakukan dalam upaya memperkaya khasanah dalam kajian elit lokal dalam perspektif ekonomi-politik. Studi ini berusaha memberikan penjelasan terhadap tatanan baru politik kekuasaan dan dinamika demokrasi lokal pasca berakhirnya kekuasaan politik Fuad Amin di Kabupaten Bangkalan.

Sementara tujuan khusus dari penelitian ini adalah memahami relasi bisnis politik beradaptasi pasca Fuad Amin sekaligus mengulas praktik demokrasi lokal yang berlangsung di Bangkalan berbasis dominasi

kalangan elit lokal, bos lokal dan implikasinya bagi hubungan negara dan *civil society* di era desentralisasi pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, studi ini memberikan kontribusi dan warna dalam mengisi diskursus tentang elit lokal terutama berkaitan dengan tema bos lokal melalui perspektif ekonomi politik. Studi ini juga akan memberikan penjelasan yang segar terkait fenomena bos lokal yang menggerogoti demokrasi dan kekuasaan politik di Bangkalan. Pada umumnya, penjelasan tentang bos lokal yang dikembangkan oleh Sidel telah banyak dilakukan oleh ilmuwan politik di Indonesia. Namun tema yang lebih menitik pada kekuatan aliansi bisnis politik yang bertahan pasca berakhirnya kekuasaan politik bos lokal masih belum ditemukan dan/atau belum dilakukan.

Signifikansi studi ini adalah mempelajari kemampuan aliansi bisnis politik pasca berakhirnya kekuasaan politik Fuad Amin di Kabupaten Bangkalan dalam mengontrol dan menguasai relasi kekuasaan dalam tatanan demokrasi lokal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan berupa rekomendasi praktis yang bermanfaat bagi pemerintah dan *civil society* dalam interaksi politik dan kekuasaan negara.